

PERANAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DISTRIK GILOBANDU KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA

Eko Kogoya,

J. Mandey,

Joorie M. Ruru

ABSTRACT: *Camat leadership role is very important and decisive in realizing the implementation of effective public in the district. In this regard, this research is intended to answer the question how the district head's leadership role in the organization of public services in the District Gilobandu Tolikara Papua Province.*

Based on the literature review, the district head's leadership role in administering public services seen from several indicators, namely: Head leadership role in setting the public service program, in developing and directing the district government apparatus, in encouraging morale in the sub-district government officials, in enforcing labor discipline government officials districts, to monitor and oversee the implementation of tasks sub-district government officials, in assessing and evaluating the performance of the government paratur districts, and in making efforts to improve the performance of public service.

This study uses a qualitative method. Research informants who were interviewed as many as 12 people are Head, Sekcam, 2 section head, 3 person executive staff, and 5 the head of the village / town. Collecting data using interview techniques. While the analysis of data using qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Huberman.

Based on the results of the study be concluded as follows: (1) sub-district leadership role in administering public services seen from the indicators mentioned above can already be realized with quite effective in districts Gilobandu Tolikora Regency of Papua Province. (2) Head are quite effective leadership has been able to realize the implementation of public service that is quite effective in Gilobandu district, though not maximized.

Based on the results of this penellian then it can be recommended some suggestions as follows: (1) Head needs to take action more effective in moving, foster and oversee the subordinate personnel in public service delivery. (2) Leadership camat in the public service in the District Gilobandu need to be supported by the availability of adequate leadership in the form of budget, facilities and working facilities, as well as support the cooperation of all subordinates.

Keywords: camat leadership, public service.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1999 bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan undang-undang pemerintahan daerah yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam perkembangan selanjutnya, UU. No.22 Tahun 1999

dikoreksi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kebijakan otonomi daerah dalam UU.No.32 Tahun 2004, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Jika sebelumnya kecamatan merupakan “perangkat wilayah” dalam kerangka asas desentralisasi, sekarang ini berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik/masyarakat. Selain itu Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang

koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat. Selain itu, Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah (PP.No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).

Sehubungan dengan tugas Camat dalam pelayanan publik, PP.19 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Camat melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan. Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tersebut meliputi : (1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; (2) melakukan percepatan pencapaian standar

pelayanan minimal di wilayahnya; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; dan (4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

Harus diakui bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pada era otonomi daerah sekarang ini mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga diharapkan akan lebih mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Namun demikian, pembaharuan dari kedua sisi tersebut hingga sekarang ini belumlah sepenuhnya memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, kurang responsif, masih lemahnya jaminan kepastian (hukum, biaya, dan waktu), serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang mengindikasikan penyimpangan dan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa fenomena umum tentang permasalahan atau kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut juga nampak atau masih terdapat di wilayah

Kecamatan/Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikora Propinsi Papua. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kecamatan/distrik ini belum menunjukkan kinerja yang optimal.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan atau kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan, maka diperlukan peranan kepemimpinan yang efektif dari Camat selaku pemimpin wilayah kecamatan di dalam menggerakkan, mengarahkan, dan mengawasi para aparat/pegawai pemerintah kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana dikatakan para ahli bahwa keberhasilan suatu organisasi di dalam menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tingkat dominan ditentukan oleh faktor kepemimpinan dari orang-orang yang disertai tugas memimpin organisasi yang bersangkutan (Stoner & Wankel, 1996; Gibson, dkk, 1998; Garry Yukl, 2004).

Bertolak dari permasalahan dan pemikiran tersebut mendorong untuk melakukan suatu penelitian tentang “peranan kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikora Propinsi Papua.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian yang hendak dijawab dalam studi ini adalah “Bagaimana peranan kepemimpinan Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikora Propinsi Papua ?”.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kepemimpinan Camat dalam penyelenggaraan pelayanan public di

Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikara Propinsi Papua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan masalah-masalah praktis, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi negara/publik, khususnya bidang studi kepemimpinan dan manajemen pelayanan publik.
- b. Secara praktis kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu pemerintah daerah Kabupaten Tolikara, terutama pemerintah kecamatan/distrik Gilobandu dalam rangka upaya mewujudkan pelayanan publik yang “prima”.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Menurut Arikunto (2002), penelitian kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam proses penelitiannya tidak perlu mengajukan suatu hipotesis. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengembangkan konsep-konsep. menghimpun fakta, mengklasifikasi data,

menganalisis dan menafsirkan data, akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Konsep yang merupakan fokus penelitian ini ialah “peranan kepemimpinan Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik”. Peranan kepemimpinan Camat didefinisikan secara konseptual sebagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Camat/Kepala Distrik Gilobandu di dalam membina dan mengarahkan, menggerakkan atau mendorong, memonitor dan mengawasi para aparatur bawahannya serta mengevaluasi kinerja mereka dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan kewenangan pemerintah kecamatan., ataupun yang dilimpahkan atau ditugaskan oleh Bupati untuk diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan seperti pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann. Langkah-langkah analisis interaktif dari Hubermann dan Miles (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992) terdiri dari : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi Pengumpulan Data. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan menggunakan pedoman wawancara.

- a. Reduksi data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.
- b. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah penarikan simpulan atas hasil penelitian.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “peranan kepemimpinan Camat” dalam penyelenggaraan pelayanan publik”. Peranan kepemimpinan Camat didefinisikan secara konseptual sebagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Camat/Kepala Distrik Gilobandu di dalam membina dan mengarahkan, menggerakkan/memotivasi, mengawasi, dan mengkoordinasikan para aparatur pemerintah kecamatan/distrik ataupun pemerintah desa, serta mengevaluasi kinerja para aparatur pemerintah kecamatan/distrik dan pemerintah desa/kampung dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan untuk mengungkap peranan kepemimpinan camat/kepala distrik dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut antara lain adalah : apakah capat didalam menetapkan program pelayanan publik di wilayah kecamatan turut melibatkan para aparat pemerintah kecamatan atau desa/kampung; apakah camat memberikan

petunjuk teknik kepada aparat pemerintah kecamatan dan desa/kampung sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik; apakah camat memberikan pembinaan dan pengarahan kepada aparat pemerintah kecamatan dan desa/kampung dalam penyelenggaraan pelayanan publik; apakah camat menggerakkan dan mendorong/memotivasi semangat kerja bawahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; apakah camat menegakkan disiplin kepada aparatur pemerintah kecamatan/desa sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik; apakah camat memonitor dan mengawasi para aparatur pemerintah kecamatan atau desa/kampung dalam penyelenggaraan pelayanan publik; apakah camat menilai dan mengevaluasi kinerja para aparatur pemerintah kecamatan/desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan apakah camat melakukan upaya-upaya konkrit untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Hasil wawancara terhadap sebanyak 12 informan sebagaimana dideskripsikan di atas dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

- a. Peranan kepemimpinan camat dalam penyusunan program dan kegiatan pelayanan publik di Distrik Gilobandu cukup efektif. Semua informan yang diwawancarai mengakui bahwa Camat dalam membahas dan menetapkan program pelayanan publik melibatkan para pegawai bawahannya .
- b. Peranan kepemimpinan camat dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai bawahannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik cukup efektif. Semua informan yang diwawancarai mengakui bahwa camat selalu memberikan

- pembinaan dan pengarahan kepada para pegawai sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Peranan kepemimpinan camat untuk mendorong semangat kerja para pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik cukup efektif. Semua informan yang diwawancarai mengatakan camat mereka selalu mendorong para bawahannya untuk meningkatkan semangat kerja dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
 - d. Peranan kepemimpinan camat untuk membina dan menegakkan disiplin kerja para bawahannya cukup efektif. Semua informan mengakui bahwa camat mereka cukup besar perhatiannya dalam membina dan menegakkan disiplin kerja para bawahannya di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - e. Peranan kepemimpinan camat untuk memonitor dan mengawasi para bawahannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik cukup efektif. Semua informan mengakui camat mereka selalu memonitor dan mengawasi langsung para bawahannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - f. Peranan kepemimpinan camat untuk mengevaluasi kinerja para bawahannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik cukup efektif. Semua informan menyatakan camat mereka secara berkala mengevaluasi kinerja para pegawai.
 - g. Peranan kepemimpinan camat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik cukup efektif. Semua informan menyatakan camat mereka melakukan tindakan-tindakan nyata untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik seperti berupaya

mengatasi kendala keterbatasan sarana dan prasarana, berupaya meningkatkan semangat dan disiplin kerja para pegawai.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah dapat diwujudkan dengan cukup efektif di Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikora Propinsi Papua. Selaku pemimpin atau kepala kecamatan/distrik, Camat Gilobandu melakukan aktivitas dan tindakan yang cukup efektif penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dalam menetapkan program dan kegiatan pelayanan publik, membina dan mengarahkan para pegawai, mendorong semangat kerja para pegawai, membina dan menegakkan disiplin para pegawai, memonitor dan mengawasi para pegawai, serta mengevaluasi kinerja para pegawainya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sesuai dengan konsep kepemimpinan bahwa peran dari pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap perilaku dan aktivitas orang-orang yang dipimpin agar selalu terarah kepada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. (Sunindia dan Widiyanti, 1998). Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan Camat Gilobandu dalam membina dan mengarahkan para pegawai bawahannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah dapat dilakukan dengan cukup efektif.

Peranan lainnya dari pemimpin adalah memotivasi para bawahannya agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik dan efektif (Sunindhia dan

Widiyanti, 1998) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan Camat dalam memotivasi semangat kerja para aparatur bawahannya di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah dapat diwujudkan dengan cukup efektif di distrik Gilobandu.

Peranan pemimpin dalam membina dan menegakkan disiplin kerja para bawahannya juga sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan camat dalam menegakkan disiplin para bawahannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah dapat diwujudkan dengan cukup efektif di distrik Gilobandu.

Peranan yang juga sangat penting dilakukan oleh setiap pemimpin organisasi adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas dari orang-orang dan kegiatan dari unit-unit kerja yang dipimpinnya agar pelaksanaan kegiatan dapat beralasan efisien dan terhindar dari penyimpangan (Siagian, 1998). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan camat dalam mengamati dan mengawasi para bawahannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah dapat diwujudkan dengan cukup efektif di Distrik Gilobandu.

Dengan demikian penelitian ini dapat menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikora Propinsi Papua adalah cukup efektif dilihat dari beberapa indikator yang dipakai dalam penelitian ini.

Sebagaimana hasil wawancara tersebut di atas bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah Distrik Gilobandu walaupun belum optimal namun semua informan mengakui bahwa kinerja

yang cukup baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kinerja pemerintah distrik Gilobandu dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah cukup baik itu terwujud disebabkan antara lain oleh karena peranan kepemimpinan camat yang cukup efektif.

Hasil penelitian ini dapat mengisyaratkan bahwa kepemimpinan camat mempunyai peranan yang sangat penting untuk efektifitas atau keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dengan perkataan lain, kemampuan camat di dalam menggerakkan, membina, mengarahkan, dan mengawasi aparatur bawahannya sangat menentukan efektivitas atau kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kecamatan. Oleh karena itu implikasi penting dari hasil penelitian ini ialah camat harus dapat meningkatkan peran kepemimpinannya di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.

KESIMPULAN

Selaku pemimpin kecamatan, peranan kepemimpinan Camat sangat penting dan menentukan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.

Dalam penelitian ini peranan kepemimpinan Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Distrik Gilobandu Kabupaten Tolikora Propinsi Papua dilihat dari beberapa aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh Camat : peranan kepemimpinan Camat dalam menetapkan program pelayanan publik, peranan kepemimpinan camat dalam membina dan mengarahkan para aparatur pemerintah kecamatan, peranan kepemimpinan camat dalam mendorong semangat kerja aparat pemerintah

kecamatan dalam, peranan kepemimpinan camat dalam menegakkan disiplin kerja aparatur pemerintah kecamatan, peranan kepemimpinan camat dalam memonitor dan mengawasi pelaksanaan tugas aparatur pemerintah kecamatan, peranan kepemimpinan camat dalam menilai dan mengevaluasi kinerja para paratur pemerintah kecamatan, dan peranan kepemimpinan camat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik dari pemerintah kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan kepemimpinan Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilihat dari indikator-indikator tersebut di atas sudah dapat diwujudkan dengan cukup efektif di kecamatan Gilobandu Kabupaten Tolikora Propinsi Papua.
2. Kepemimpinan Camat yang cukup efektif tersebut telah dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang cukup efektif di distrik Gilobandu, walaupun belum maksimal.

SARAN

Bertolak dari hasil penellian ini maka dapatlah direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peranan kepemimpinan Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Distrik Gilobandu sudah cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan. Untuk itu camat perlu melakukan tindakan-tindakan yang lebih fektif dalam menggerakkan, membina, dan mengawasi para aparatur bawahannya di dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
2. Kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Distrik Gilobandu perlu didukung oleh

tersedianya sarana kepemimpinan yang memadai baik berupa anggaran, sarana dan fasilitas kerja, maupun dukungan kerjasama dari seluruh bawahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto,S. 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gibson L.J. dkk, 1998, *Organisasi* (terjemahan), Jakarta, Erlangga.
- Moleong, L.J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Siagian, S.P. 1998, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sunindhia dan Widiyanti, 1998, *Manajemen dan Kepemimpinan*, Jakarta, Gunung Agung.
- Stoner,L.J. dan Charles Wankel, 1996, *Manajemen*, terjemahan, Intermedia, Jakarta.

Sumber Lain (Dokumen) :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.